BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR: B/ 3 /KPTS/03/2024

TENTANG

PERENCANAAN PENYUSUNAN PERATURAN BUPATI
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perencanaan Penyusunan Peraturan Bupati Tahun Anggaran 2024;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Perencanaan Penyusunan Peraturan Bupati Tahun Anggaran 2024 dengan daftar sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Perencanaan penyusunan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud diktum kesatu dapat dilakukan penambahan atau pengurangan berdasarkan kebutuhan dan Peraturan Perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 2 Januari 2024

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

Tembusan :
1. Gubernur Lampung;
2. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
3. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Lampung Barat.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 3 /KPTS/03/2024
TANGGAL: 2 Januari 2024

DAFTAR PERENCANAAN PENYUSUNAN PERATURAN BUPATI
TAHUN ANGGARAN 2024

No	Judul Rancangan Peraturan Bupati	Perangkat Daerah Pemrakarsa
1	Arsitektur Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik	Dinas Kominfo
2	Peta Rencana Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik	
3	Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	
4	Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perkotaan Liwa	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
5	Pembentukan Pusat Pengendalian Operasi Penangulangan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
6	Kajian Resiko Bencana	
7	Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir	Dinas Perhubungan
8	Jalan Umum sebagai Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	
9	Rencana Induk *Geopark* Kaldera Suoh	Balitbang
10	Pelaksanaan Mal Pelayanan Publik	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
11	Pedoman Cadangan Pangan Dalam Rangka Penanggulangan Dampak Bencana	Dinas Ketahanan Pangan
12	Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Nutrisi Lansia	Dinas Sosial
13	Sistem Layanan Rujukan Terpadu dan Pusat Kesejahteraan Sosial	
14	Perubahan Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2013 tentang Pedoman Akuntansi RSUD Alimuddin Umar	RSUD Alimuddin Umar
15	Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2022 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Alimuddin Umar	
16	Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Palayanan Pasar	Dinas Koperasi Ukm
17	Penyediaan Seragam Gratis	Dinas Pendidikan
18	Biaya Penyelenggaraan Pendidikan Merata	
19	Beasiswa Pendidikan Seni	
20	Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025	BPKD
21	Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024	
22	Pedoman Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024	
23	Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah	
24	Perubahan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai	
25	Perubahan Peraturan Bupati tentang Perjalanan Dinas	
26	Perubahan Peraturan Bupati tentang Transaksi Non Tunai	

27	Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023	
28	Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Daerah	
29	Besaran NJOP dan NJOPTKP	
30	Nilai Sewa Reklame	
31	Sistem Dan Prosedur Pemungutan Retribusi Daerah	
32	Tata Cara Pengelolaan PBB-P2	
33	Tata Cara Penerbitan Izin Pendirian Reklame	
34	Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame	
35	Tata Cara Pengelolaan PBJT	
36	Tata Cara Pengelolaan Pajak Air Tanah	
37	Tata Cara Pengelolaan Pajak Sarang Burung Walet	
38	Tata Cara Pengelolaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan	
39	Sistem dan Prosedur Pengelolaan BPHTB	
40	Sistem dan Prosedur Pengelolaan Opsen PKB dan BBNKB	
41	Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
42	Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024	
43	Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Tahun 2023-2026	
44	Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan	
45	Rencana Aksi Kabupaten Layak Anak	Dinas KBPP dan PA
46	Tata Cara Penjatuhan Hukuman Displin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	BKP SDM
47	Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah	
48	Pedoman Pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuian Ijazah Kenaikan Pangkat	
49	Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon Tahun Anggaran 2024	Dinas PMP
50	Alokasi Dana Pekon Setiap Pekon Tahun Anggaran 2024	
51	Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon Tahun Anggaran 2025	
52	Alokasi Dana Pekon Setiap Pekon Tahun Anggaran 2025	
53	Pedoman Pendirian Pengurusan Pengelolaan dan Pemberhentian Badan Usaha Milik Desa	
54	Peratin	
55	Pemilihan Peratin	
56	Pedoman Pengembangan Kapasitas Masyarakat dan Pemerintahan Pekon Dalam Pembangunan Pekon	
57	Peta Jalan (*Road Map)* Peran dan Komitmen Multipihak Terhadap Mitigasi Konflik Satwa dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat yang Berkelanjutan Tahun 2023-2028	DLH
58	Implementasi Sistem Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintahan	Bagian Organisasi

59	Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah	
60	Sitem Kerja Untuk Penyederhanaan Birokrasi	
61	Tata Naskah Dinas dilingkungan Pemerintah Daerah	
62	Kelas Jabatan dilingkungan Pemerintah Daerah	
63	Pedoman Penyusunan Kerangka acuan Kerja	Bagian.Adm. Pembangunan

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008